



EDISI JUMAT, 25 APRIL 2025

H A R I A N

LENGKARA

Perubahan

02
05
10

GOVERNMENTTODAY
Bukan 9,9 Juta Unit, Backlog Rumah
Disebut Capai 15 Juta Tahun Ini

NUSANTARA
Babak Baru Dugaan Ijazah Palsu: Jokowi
Absen, Hakim Minta Dilakukan Mediasi

LISTSTYLE
Mengenal Basilika Santa Maria Maggiore,
Rumah Abadi Paus Fransiskus

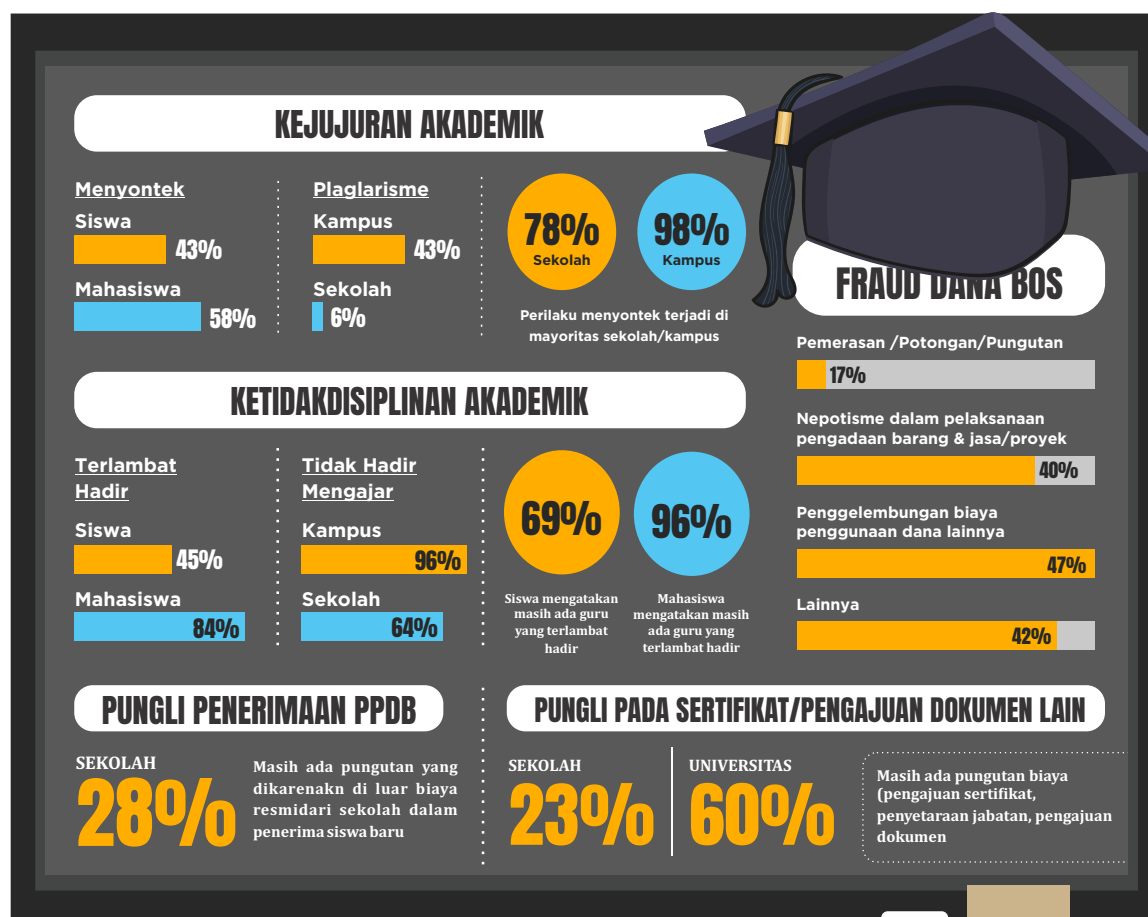
KERIBUTAN WARNAI SIDANG HASTO

Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/4/2025) diwarnai keributan. Ricuh ini terjadi di sela disebabkan adanya ketegangan antara simpatisan PDI Perjuangan dan sejumlah orang. Sidang beragendakan mendengar keterangan dua orang saksi, yakni Agustiani Tio Fridelina dan Donny Tri Istiqomah. Sedangkan satu saksi Saeful Bahri mangkir dari sidang tersebut. Polisi pun tampak mengamankan beberapa orang. Berita terkait baca halaman 3.(ist.antara)

WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA: PRAKTIK MENYONTEK MASIH MERAJALELA

Ditemukan di 98% Kampus dan 78% Sekolah, KPK Sebut Indeks Integritas Pendidikan Turun

Coreng masih mewarnai wajah pendidikan Indonesia. Data terbaru dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (24/4/2025), menunjukkan indeks integritas pendidikan secara nasional tahun 2024 berada di angka 69,5 dari skala 1-100. Angka itu menurun dibanding indeks tahun 2023 yang mencapai 73,7. Komisi anti-rasuah juga mengungkapkan praktik ketidakjujuran akademik masih marak terjadi di perguruan tinggi, dengan angka menyontek mencapai 98 persen. Di tingkat sekolah, perilaku curang tersebut juga masih ditemukan di sekitar 78 persen sekolah. Terkait penggunaan anggaran, masih ada 12 persen sekolah yang tidak menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya. Temuan lain, 30 persen dari guru/dosen dan 18 persen kepala sekolah/rektor masih menganggap pemberian hadiah dari siswa atau wali murid sebagai hal yang wajar untuk diterima. Hasil SPI Pendidikan bisa menjadi cermin urgensi membangun benteng antikorupsi di dunia pendidikan tak bisa ditunda. Agar perilaku korupsi tak diwariskan.



Batas Maksimal Gaji Diubah, Pengembang Desak Harga Rumah Subsidi Dinaikkan

Kebijakan yang mengatur perubahan batas maksimal gaji Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi resmi berlaku. Pengembang mendesak harga rumah subsidi ikut dinaikkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menaikkan batas gaji dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta. Hal ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono meminta harga rumah juga naik. "Mungkin Bang Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait) perlu menambah satu hal lagi, yaitu meluaskan harga jual rumah karena yang punya penghasilan Rp 14 juta itu dia tidak harus beli yang Rp 166 juta, dia bisa beli sampai Rp 400 juta," kata Ari dalam pengumuman penerbitan aturan baru tersebut di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Kamis (24/04/2025).

Menurutnya, peningkatan harga jual rumah subsidi akan disambut baik oleh kaum milenial dengan penghasilan menengah tanggung.

Sebagai informasi, aturan baru batas gaji MBR untuk beli rumah subsidi termaktub dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah yang ditetapkan pada 17 April 2025 oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Aturan ini menggantikan aturan



lama, yakni Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023. Ara mengatakan bahwa aturan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 22 April 2025.

Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menaikkan batas gaji dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah

menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta. Hal ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor

Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah. (wid,rls,ist,ant/dya)

Bukan 9,9 Juta Unit, Backlog Rumah Disebut Capai 15 Juta Tahun Ini

WAKIL Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kebutuhan rumah tangga terhadap hunian.

Menurut Fahri, tahun ini backlog rumah tidak lagi di angka 9,9 juta atau 12 juta seperti yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.

"Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean, untuk kepemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama, sekitar 26 juta," kata Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, awal pekan lalu.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh kementerian, jumlah backlog atau kekurangan rumah bagi masyarakat kini telah mencapai angka sekitar 15 juta unit, meningkat tajam dari angka sebelumnya yang

berkisar antara 9,9 juta hingga 12 juta unit.

Backlog ini merujuk pada antrean masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, dan angkanya terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah keluarga di Indonesia. Selain backlog kepemilikan rumah, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menangani renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), yang jumlahnya saat ini berada di kisaran 26 juta unit, menurut data yang disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat.

Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa kenaikan angka backlog ini selaras dengan dinamika demografis terbaru di Indonesia. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 289,5 juta jiwa, dengan jumlah keluarga yang tercatat sebanyak 91,3 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan data tahun

sebelumnya yang menunjukkan jumlah keluarga berada pada kisaran 74 hingga 78 juta. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga baru, yang berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan akan hunian.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi meningkatnya jumlah keluarga adalah perubahan dalam struktur keluarga itu sendiri. Rata-rata anggota dalam satu keluarga kini hanya berjumlah tiga orang, berbeda dari sebelumnya yang umumnya terdiri atas lima orang. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk membentuk keluarga inti yang lebih kecil, yang sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya angka pernikahan dan terbentuknya rumah tangga baru. Namun, seiring dengan terbentuknya keluarga-keluarga baru ini, sebagian besar di antaranya mengalami kesulitan dalam mengakses kepemilikan rumah. (wid,rls,tmo/dya)

Bukti Rekaman KPK: Hasto Talangi Dana Suap Harun Masiku Rp 1,5 M

Jaksa KPK memutar rekaman hasil penyadapan dalam persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Muncul kata-kata 'perintah ibu' serta 'garansi saya' dalam rekaman tersebut.

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, disebut akan menalangi biaya suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) DPR RI Harun Masiku sebesar Rp 1,5 miliar. Informasi ini terungkap dalam percakapan antara pengacara PDI-P Donny Tri Istiqomah dengan kader PDI-P Saeful Bahri melalui sambungan telepon yang disadap penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rekaman percakapan telepon yang disadap itu kemudian diputar jaksa KPK saat memeriksa Donny sebagai saksi dugaan suap Harun yang menjerat Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

Dalam percakapan itu, Saeful dan Donny menggonggong Harun yang menangis dan melapor pada Hasto. Namun, konteks percakapan itu belum jelas. "Ya sudah ini, oh ya ya, Sekjen udah WA (WhatsApp) saya juga, mau ditalangin. Jadi Mas Hasto yang nalangin 1,5 (miliar)," kata Saeful dalam telepon itu. "Ya sudah kapan katanya Sekjen?" timpal Donny. "Hari ini, kata Harun sih hari Minggu dia," jawab Saeful.

Setelah memutar rekaman tersebut, jaksa KPK menanyakan maksud dari pernyataan Saeful bahwa Hasto akan menalangi Rp 1,5 miliar untuk keperluan Harun. Namun, Donny mengelak. Menurutnya, tidak tepat jika jaksa meminta penjelasan atas pernyataan Saeful kepada dirinya.

"Itu kan Saeful yang ngomong, jangan minta persetujuan saya," ujar Donny. "Iya kan saudara yang diajak komunikasi," timpal jaksa KPK.

"Oh, yes, apakah Saeful mengarang indah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya yakin bahwa uang itu dari funder itu, 4 orang itu yang saya temui di (hotel) Hyatt," tutur Donny. Dalam rekaman telepon lain, Saeful Bahri menghubungi Agustiani Tio pada 6 Januari 2020 lalu. Saeful menyatakan kepada Agustiani Tio bahwa Hasto Kristiyanto menjadi garansi ihwal permintaan PAW Harun Masiku.

"Tadi Mas Hasto telepon lagi bilang ke Wahyu, 'ini garansi saya, ini perintah dari Ibu dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi,'" ucap Saeful dalam percakapan telepon dengan Agustiani Tio tersebut.

Dalam percakapan itu, Saeful juga



menyatakan agar meminta KPU tetap mengikuti tafsiran dari ketentuan hukum yang disodorkan PDIP untuk proses PAW Harun Masiku.

"Jadi prinsipnya adalah bahwa kita ya kan, giring aja menggiring ke hukum, menggiring ke ketentuan hukum gitu, loh, Mbak. Bahwa postulat yang tafsiran paling benar adalah tafsiran-tafsiran dari kita. Itu lah yang kita nanti canangkan ke semua stakeholder," kata Saeful dalam percakapan telepon itu.

"Iya," timpal Agustiani Tio.

"Walaupun di luar sana, kan, ada tafsiran postulat ini hanya MA, yang lain enggak. Kita harus bersikeras, harus sefrekuensi dengan KPU. KPU sefrekuensi dengan kita di mana postulat yang dimaksud adalah postulat versi kita, gitu aja," ucap Saeful.

Masih dalam sambungan telepon, Agustiani kemudian mengaku sudah menyampaikan kepada Wahyu Setiawan agar bisa mengkondisikan untuk bertemu dengan komisioner KPU lainnya, Hasyim Asy'ari.

"Aku tadi kan telepon juga si Wahyu, aku minta direm waktu untuk Hasyim, nah jadi aku jam 4, jam 3-an aku telepon 'Yu, kondisikan Hasyim, nanti jam 4 itu ketemu dengan Hasyim', gitu dengan divisi hukumnya. Sekarang aku juga mau minta izin bawa Donny [Tri Istiqomah], jadi langsung ketemu dengan Hasyim-nya di situ," kata Agustiani Tio.

"Bagus dong," balas Saeful.

"He eh, ini aku belum tahu dengan Donny-nya oke apa enggak," tutur Agustiani Tio.

Ricuh antara Satgas PDI-P, Diduga Penyusup dan Polisi

SATUAN Tugas Cakra Buana PDI-P ricuh dengan polisi saat jeda sidang terdakwa suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

Bentrokan bermula sekitar pukul 12.30 WIB ketika Satgas PDI-P tiba-tiba menangkap sejumlah orang berbaju putih yang mereka tuduh sebagai penyusup.

Polisi dan satpam kemudian berusaha menenangkan Satgas PDI-P dengan menyebut bahwa mereka yang ditangkap sebenarnya juga teman. Namun, Satgas PDI-P tetap membawa orang-orang yang mereka sebut penyusup itu bahkan memukulinya.

Walhasil, polisi dan satpam ikut terprovokasi atas kerusuhan yang ditimbulkan oleh Satgas PDI-P dan

akhirnya bentrok tak terhindarkan. Satgas PDI-P dan polisi saling dorong di dalam gedung Pengadilan Tipikor, sejumlah botol air pun melayang dan mengenai kepala seorang satpam.

Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy bahkan sampai turun tangan menenangkan Satgas PDI-P. Ronny yang sedang meladeni wawancara dengan awak media tiba-tiba menarik salah satu anggota Satgas PDI-P yang marah. Secara perlahan, polisi mulai menggiring Satgas PDI-P ke luar gedung.

Di luar, ada seseorang dari Satgas PDI-P yang marah kepada seorang polisi tak berseragam karena merasa polisi melanggar kesepakatan mengenai orang-orang yang bisa masuk ke dalam gedung pengadilan. Polisi itu pun balas memarahi anggota Satgas PDI-P itu dan langsung membawanya, Aksi polisi

"Coba aja. Kalau mau, oke, Donny-nya bisa tak panggil," ujar Saeful.

Berdasarkan catatan, dalam dakwaan jaksa untuk Saeful Bahri pada 2 April 2020 disebutkan, Harun Masiku menyiapkan uang Rp 1,5 miliar untuk menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Di tengah jalan, uang Rp 1,5 miliar itu kemudian dibagi sejumlah pihak antara lain, Wahyu, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, Saeful, dan Wahyu. (wid, ist, rls, ant/dya)

PARA PELAKU DI KASUS SUAP HARUN MASIKU



**HARUN
MASIKU**



**HASTO
KRISTIYANTO**



**DONNY
TRI ISTIQOMAH**



**AGUSTIANI
TIO FRIDELINA**



**WAHYU
SETIAWAN**



**SAEFUL
BAHRI**

- Telah menjalani hukuman
- Ditetapkan sebagai tersangka
- Menjalani Sindang ■ Buron

ini tentu memantik kemarahan anggota Satgas PDI-P lainnya. "Woi kok diangkut? Jangan dibawa," seru Satgas PDI-P sambil ramai-ramai berlari menyelamatkan temannya.

Polisi yang membawa anggota Satgas PDI-P pun ditarik mundur oleh rekannya untuk kembali masuk ke dalam gedung Tipikor. Situasi panas itu mereda setelah polisi dan Satgas PDI-P saling mundur satu sama lain. (Ist, kcm/dya)

Beda Hasil Uji Halal

Chomp Chomp dan BPJH-BPOM, Siapa yang Tepat?

Chomp Chomp mengungkap deretan dokumen yang menunjukkan 3 produknya yang dinyatakan mengandung unsur babi (porcine) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan BPOM itu adalah halal. Hasil-nya berbeda dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan BPOM. Kok bisa?

Temuan jajanan anak bersertifikat halal yang memiliki kandungan babi memicu riak-riak baru. Pakar produk pangan yang juga eks Menteri Pertanian Anton Apriantono mengungkap analisisnya terkait temuan produk berlabel halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan BPOM yang ada unsur babi (procine).

Padahal, produsen tersebut dalam hal ini Chomp Chomp, sudah melakukan uji laboratorium oleh Sucofindo. Hasilnya dalam uji lab itu, 3 produk mereka itu negatif mengandung unsur babi.

Anton menilai ada beda hasil uji laboratorium itu karena perbedaan standarisasi uji laboratorium kehalalan.

"Di sini perlunya standar pengujian, mungkin masing masing lab memiliki metode analisis sendiri sehingga hasilnya berbeda, selain itu bergantung pula pada sensitivitas alat dan metode analisisnya," kata Anton pada Kamis (24/4/2025).

Diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan BPOM menemukan serta merilis daftar sembilan produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi (porcine). Dari 9 produk itu, 7 di antaranya sudah berlabel halal. Dari 7 produk itu, 3 di antaranya diproduksi oleh Chomp Chomp.

Chomp Chomp memberikan klarifikasi terkait hal itu. Mereka mengungkap deretan dokumen yang menunjukkan 3 produknya dinyatakan mengandung unsur babi (porcine) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan BPOM itu adalah halal. Berdasarkan uji laboratorium BUMN Sucofindo ketiga produk yang dinyatakan ada unsur porcine itu ternyata negatif.

Anton menilai untuk pengujian keberadaan unsur babi harus menggunakan metode standar agar



(Ilustrasi) Berdasarkan uji laboratorium BUMN Sucofindo Chomp Chomp sebut ketiga produk yang dinyatakan ada unsur porcine ternyata negatif alias halal. (Ist)

tidak ada perbedaan hasil. Dia tidak menjelaskan seperti apa standarisasi yang harus dipenuhi itu.

"Jadi, untuk pengujian keberadaan unsur babi harus menggunakan metode standar yang sudah diakreditasi oleh badan yang berwenang, dalam hal ini komite

akreditasi di bawah BSN," kata Anton.

"Metodenya harus menggunakan baku yang sudah menjadi metode standar pengujian," lanjut dia.

Di sisi lain, Anton menyarankan, semestinya ke depan untuk uji produk halal tidak bisa hanya sekadar uji lab. Namun juga ke sumber atau pabrik

MUI Klaim Tak Terlibat

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Iskandar mengatakan pihaknya tidak terlibat dalam pemberian label halal untuk produk apapun, termasuk jajanan anak bersertifikat halal yang memiliki kandungan babi yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.

"Kami tidak memiliki wewenang memberi izin. Kami ini hanya memberi fatwa agama," kata Anwar saat ditemui di Gedung Asrama Haji I Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Adapun soal produk yang berlabel halal dan disertai logo MUI, Anwar menuturkan hal itu hanya sebatas rekomendasi atau fatwa saja. Itu pun, menurut dia, pihaknya baru akan menerbitkan surat fatwa MUI setelah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) mengeluarkan hasil penelitian yang menyatakan produk tersebut halal. "Jadi sesuai sama LPPOM. Hasil penelitian dari laboratorium," katanya.

Adapun soal temuan sejumlah jajanan anak yang berlabel halal tapi mengandung babi, Anwar menuturkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait. Anwar juga

menyarankan agar pemerintah mencabut izin perusahaan yang memproduksi jajanan tersebut.

"Masyarakat harus dilindungi dari produk-produk yang seperti itu. Oleh karena itu, kami mohon pada yang punya otoritas untuk ditarik dan dicabut izinnya," kata dia.

Menurut Anwar, menegur dan mengevaluasi saja tidak cukup. Pemerintah, dia berujar, harus memberikan sanksi tegas supaya memberikan efek jera. Anwar juga meminta pemerintah segera menarik produk-produk tersebut dari pasaran.

"Jadi bukan hanya dievaluasi, itu ditarik. Jangan beredar lagi di masyarakat. Kalau ditarik baru aman," katanya.

Kendati demikian, Anwar berpendapat kecurangan tersebut murni dilakukan oleh perusahaan. Ia menduga pada saat sertifikat halal itu diterbitkan, pihak perusahaan belum memasukan unsur babi ke dalam produk tersebut.

"Misal dulu waktu diberikan belum (ada babi). Tapi kemudian dalam perkembangannya dari produsen kemudian memasukkan unsur-unsur haram," tutur dia. "Maka dalam waktu sekian tahun, kemudian

bahan baku.

"Digabung dengan metode penelusuran seharusnya bisa diketahui asal usul bahan, jadi jangan hanya mengandalkan hasil lab karena bagaimana pun canggihnya pengujian lab ada batas kemampuan deteksinya, itu yang disebut limit deteksi," urainya.

Kata dia, jika unsur babinya berada di bawah limit deteksi metode dan alat yang digunakan, maka tidak bisa memastikan keberadaan unsur babinya.

"Ya sampai ke ujungnya, misal ingredient yang dicurigai gelatin, walau ada sertifikat halalnya, tapi datang pabriknya, benar tidak bahan bakunya bukan dari babi?" tegas dia. (wid, str, rls, ant/dya)

Daftar 9 Produk yang Mengandung Unsur Babi:

1. Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (Rasa Leci, Jeruk, Stroberi, Anggur)
2. Corniche Apple Teddy Marshmallow (Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy)
3. ChompChomp Car Mallow (Bentuk Mobil)
4. ChompChomp Flower Mallow (Bentuk Bunga)
5. ChompChomp Mini Marshmallow (Bentuk Tabung)
6. Hakiki Gelatin (Bahan Pembentuk Gel)
7. Larbee - TYL Marshmallow Isi Selai Vanila
8. AAA Marshmallow Rasa Jeruk
9. SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat

diteliti lagi, ternyata haram."

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menemukan beberapa merek jajanan anak yang menggunakan unsur turunan babi tanpa mencantumkan informasi yang jujur diemasannya. Sejumlah produk tersebut bahkan memiliki label halal yang diduga tak sesuai ketentuan.

Sebagian besar dari produk tersebut menggunakan gelatin babi sebagai salah satu bahan bakunya. Beberapa bahkan sempat beredar dengan label halal palsu atau tanpa keterangan jelas mengenai kandungan porcine, sehingga dinilai hal itu menyesatkan konsumen muslim. (wid, rls/dya)

Babak Baru Dugaan Ijazah Palsu: Jokowi Absen, Hakim Minta Dilakukan Mediasi



Suasana sidang perdana perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (24/4/2025). (ist)

Pengadilan Negeri (PN) Surakarta menggelar sidang perdana dengan tergugat mantan presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (24/4/2025). Sidang kasus perdata ini menggelar dua perkara, yakni soal wanprestasi mobil Esemka dan dugaan ijazah palsu SMAN 6 Solo.

Jokowi absen di kedua sidang karena terbang ke Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus.

Terkait sidang gugatan ijazah, Prof Adi Sulistyono ditunjuk sebagai mediator dalam sidang dengan agenda mediasi yang akan digelar Rabu (30/4/2025).

Diketahui, Prof Adi merupakan guru besar (Gubes) Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Penunjukan mediator dilakukan oleh penggugat Muhammad Taufiq mengatasnamakan kelompok Tim Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Penunjukan tersebut kemudian disetujui tergugat baik tergugat I Jokowi diwakilkan oleh Kuasa Hukum YB Irpan. Serta disetujui tergugat II Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, tergugat III SMA Negeri 6 Solo dan tergugat IV Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Karena kesepakatan itu, Majelis Hakim Putu Gde Hariadi dengan Anggota Majelis Hakim Sutikna dan Wahyani, menetapkan mediator antar tergugat dan pengugat.

"Jadi mediasi ini adalah memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami meminta untuk dalam mediasi ini para prinsipal (Jokowi) untuk hadir," ujar Kuasa Hukum Penggugat, Andika Dian Prasetyo, usai sidang perdana.

Ditambahkan penggugat, Muhammad Taufiq, gugatan dan sidang ini memberikan penekanan pendidikan politik lewat pengadilan.

"Pengadilan ini tempat hormat untuk membuktikan seseorang itu menghormati hukum dan kami sepakat andai Pak Jokowi akan datang mediasi, sampai pukul 24 jam, kami semua bersedia," terangnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Jokowi, YB Irpan menyepakati untuk melakukan mediasi dengan penyelesaian perkara harus diawali

dengan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.

Menurut dia, mediasi membuka peluang kedua pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melanjutkan ke pokok perkara.

"Suatu keharusan bagi para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum pokok perkara itu diperiksa oleh Majelis Hakim. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutan nya kepada pihak tergugat," ungkapnya.

Posisi Jokowi sebagai pihak prinsipal dinilai sangat penting dalam penyelesaian perkara ini. Menurut penggugat, Muhammad Taufiq, ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika

Hasil sidang perdana gugatan ijazah palsu sekolah menengah atas (SMA) yang dilayangkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (24/4/2025) cukup mengejutkan. Hakim meminta dilakukan mediasi yang dijadwalkan pekan depan di PN Solo.

ia tak hadir secara langsung.

"Mediasi yang hadir prinsipal. Kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan terpecahkan."

"Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan misteri ijazah seorang presiden. Kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang kami berpikir memang tidak ada ijazah itu," ungkap Taufiq setelah sidang perdana Kamis (24/4/2025).

Meski berharap akan kehadirannya, Taufiq menduga Jokowi

selaku tergugat bakal absen dalam sidang pekan depan.

Ia pun pesimistis mediasi bisa menjadi upaya penyelesaian perkara ini. "Saya meyakini intuisi saya Pak Jokowi tidak akan pernah hadir. Kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah asli sudah dibuktikan adalah nonsense. Karena mediasi di peraturan nomor 1 tahun 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi harus dihadiri yang bersangkutan prinsipal," kata Taufiq. (din, ant, rls, kcm/dya)

Ma'ruf Amin Tak Hadir, Sidang soal Mobil Esemka Ditunda

MAJELIS hakim menunda sidang perdana gugatan wanprestasi, Kamis (24/4/2025) terkait batalnya produksi mobil Esemka. Sidang dijadwalkan kembali pada 8 Mei 2025.

Penundaan itu diputuskan lantaran pihak tergugat Ma'ruf Amin tidak hadir atau tidak ada perwakilan kuasa hukum yang ditunjuk. Pantauan Tempo, sidang perdana gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka di Pengadilan Negeri Kota Solo, Kamis, 24 April 2025 itu berlangsung hanya sekitar 30 menit. Dari tiga tergugat, yakni Jokowi, Ma'ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi, hanya pihak Ma'ruf Amin yang tidak hadir. Ketua majelis hakim Gede Hariadi pun menunda sidang sampai tanggal 8 Mei 2025.

Pihak penggugat, Aufaa Luqman, hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Sigit N. Sudibyanto. Adapun Jokowi sebagai tergugat satu diwakili oleh kuasa hukumnya, YB Irpan. Sedangkan tergugat tiga yakni PT Solo Manufaktur Kreatif dengan kuasa hukumnya Sundari. "Sidang kami tunda pada 8 Mei karena pihak tergugat belum lengkap. Padahal, surat panggilan sudah sampai di

alamat tempat tinggal," kata Hariadi.

Kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreatif Sundari mengatakan pihaknya sudah melengkapi berkas yang diminta. "Semua sudah menanggapi, tidak ada masalah untuk surat kuasanya. Harusnya kan mediasi kalau para pihak hadir semua," kata Sundari.

Disinggung harapan kliennya, Sundari menyebutkan bahwa gugatan tersebut kurang kuat. Sebab selama ini tidak ada transaksi jual beli antara kliennya dan pihak penggugat.

Sidang perdana gugatan wanprestasi soal batalnya produksi mobil Esemka dengan salah satu tergugat adalah Presiden Ke-7 Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2025. Pada hari yang sama, juga digelar sidang perdana gugatan ihwal ijazah SMA Negeri (SMAN) 6 Solo terhadap Jokowi di PN Kota Solo.

Dalam sidang perdana gugatan



Aufaa Luqman Re A (19), penggugat mobil Esemka Jokowi bersama kuasa hukumnya saat menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, Kamis (24/4/2025). (ist)

mobil Esemka, Jokowi hanya diwakili oleh kuasa hukumnya YB Irpan. Jokowi absen sidang karena melawat ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. YB Irpan memberikan konfirmasi terkait hal itu.

"Beliau (Jokowi) posisi kemarin di Jakarta, dan barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan melayat ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus, berapa hari kurang tahu," ujar Irpan. (wid, rls, ant/dya)

Pajak Hotel dan Properti Kota Malang Lesu, Bapenda Khawatir Target Tak Tercapai

MALANG - Pendapatan pajak dari sektor hotel dan properti di Kota Malang menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun 2025. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya itu, muncul juga risiko peningkatan angka pengangguran.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan intervensi. Bila tidak ada langkah korektif dalam waktu dekat, Handi memperkirakan target PAD tahun 2025 berpotensi tidak tercapai. Sehingga dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) mendatang perlu dilakukan penyesuaian ulang terhadap proyek pendapatan.

Menurut Handi, sektor perhotelan yang sebelumnya menjadi salah satu penyumbang utama PAD mengalami penurunan signifikan. Pada Januari 2025, penerimaan pajak hotel masih tercatat Rp7 miliar, namun angka tersebut kemudian anjlok di Februari dan Maret 2025.

"Januari masih pengaruh dari Desember 2024, kan pembayaran di Januari. Kemudian di Februari itu

turun Rp4 miliar sekian. Maret juga turun, Rp3 miliar. Kalau melihat tren ini kan harus ada intervensi dari Pemda untuk menyelamatkan ekonomi ini," ujar Handi, Kamis (24/4/2025).

Handi menyebut, indikator ekonomi yang lesu juga ditengarai tidak adanya lonjakan signifikan pada momen libur Lebaran 2025 kemarin. Biasanya, momen tersebut menjadi masapenan bagi bisnis perhotelan.

Handi mencatat, saat libur Lebaran di tahun-tahun sebelumnya, pendapatan pajak hotel mengalami kenaikan rata-rata Rp2 miliar. Namun tahun ini, pola tersebut diakuinya tidak terjadi.

"Untungnya masih tertolong restoran, karena selama Ramadan kemarin banyak hotel yang restonya menggelar paket bukber. Tapi itu hanya menyelamatkan sementara," katanya.

Kondisi ini, lanjutnya, berdampak pada efisiensi operasional hotel. Sejumlah hotel bahkan mulai mengurangi shift karyawan sebagai bentuk penghematan. Handi menyebut, bila tren penurunan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin

gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terjadi.

"Sekarang memang belum ada laporan resmi PHK, tapi kan gak boleh dibiarkan terus turun begini," imbuhnya.

Dari sisi karakteristik, hotel-hotel di Kota Malang terbagi dua. Ada hotel wisata dan ada pula hotel konvensi yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan lembaga pemerintahan dan BUMN. Namun menurutnya, sejak awal 2025, puluhan kegiatan dari instansi tersebut telah dibatalkan imbas kebijakan efisiensi, sehingga hotel konvensi menjadi salah satu yang paling terdampak.

Lebih lanjut, selain sektor perhotelan, sektor properti juga mengalami perlambatan. Penurunan ini tercermin dari melemahnya penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto. (Santi/Lentera)

Menurut Handi, pengembang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan transaksi rumah mengalami penurunan.

"Kalau sebelumnya rata-rata bisa 100 transaksi per hari, sekarang hanya sekitar 70-an. Ini bukan karena efisiensi, tapi karena daya beli masyarakat yang menurun," jelasnya. (Santi/Dya)

Empat Lokasi Garam Tunnel di Kabupaten Malang Disiapkan Jadi Wisata Edukasi



Bupati Malang, Sanusi dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, saat panen garam tunnel di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo. (dok. Prokopim Kab Malang)

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah mendorong empat lokasi garam tunnel menjadi destinasi wisata edukasi. Upaya ini tak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produksi garam. Tetapi juga sebagai sarana pembelajaran interaktif bagi masyarakat dan pelajar tentang proses budidaya garam berbasis teknologi.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, menyebutkan empat lokasi tersebut

tersebar di wilayah Kecamatan Gedangan, Donomulyo, dan Sumbermanjing Wetan. Keempatnya adalah Pantai Bajulmati di Desa Gajahrejo, Pantai Nganteb di Desa Tumpakrejo, Pantai Modangan di Desa Sumberoto, serta Pantai Perawan di Desa Sidoasri.

"Iya, beberapa waktu lalu Pak Bupati sudah meresmikan wisata edukasi garam tunnel di Pantai Modangan Kecamatan Donomulyo. Nah, rencananya beberapa lokasi lain akan menyusul dan ingin kami jadikan sebagai wisata edukasi nantinya," ujar Victor, Kamis (24/4/2025).

Victor mengungkapkan, di Pantai Modangan Kecamatan Donomulyo, telah tersedia lahan seluas satu hektare, dengan sekitar 5.000 meter persegi yang sudah dimanfaatkan untuk produksi garam tunnel.

Dari area tersebut, telah berhasil diproduksi sebanyak tiga ton garam dengan kualitas cukup tinggi.

"Kualitas garam tunnel yang dihasilkan memiliki kandungan NaCl sekitar 95 persen dan tingkat kecerahan (putih) mencapai 70 persen. Ini sudah cukup baik untuk kebutuhan industri," jelas Victor.

Disebutkannya, salah satu industri yang telah menjadi mitra pemasaran adalah PT Bafain, produsen ikan nila dan lele asin, yang mampu membutuhkan garam berkualitas dengan kebutuhan sekitar 10 ton setiap bulan.

Kendati demikian, Victor menegaskan produksi garam tunnel belum diarahkan untuk ekspor. Pasalnya, permintaan garam berkualitas di dalam negeri sendiri masih sangat tinggi.

"Fokus kami masih pada pemenuhan kebutuhan domestik, karena banyak sektor industri makanan dan perikanan yang memerlukan garam dengan standar tertentu," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, berharap langkah yang dicanangkannya ini dapat memberikan efek domino positif bagi daerah,

khususnya dalam menggerakkan ekonomi lokal.

"Kecamatan Donomulyo memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Potensi ini menjadikannya sebagai salah satu sentra pertanian, perikanan, dan pariwisata yang patut dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan," ucap Sanusi.

Lebih lanjut, Sanusi menyampaikan, keberadaan wisata edukasi garam tunnel diharapkan tidak hanya mampu menarik kunjungan wisatawan. Tetapi sekaligus menjadi media pembelajaran bagi masyarakat umum dan pelajar.

"Wisata ini bisa menjadi ruang positif, menyenangkan, dan tidak membosankan untuk memperluas wawasan, terutama mengenai proses produksi garam tunnel," jelasnya.

Sanusi menambahkan, pengembangan kawasan ini juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, mulai dari sektor kuliner, kerajinan, hingga industri kreatif. "Pada muaranya, sektor pertanian maupun pariwisata di Kecamatan Donomulyo dan sekitarnya dapat terus tumbuh dan berkembang," pungkasnya. (Santi/Dya)



Warga India membakar spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menentang Pakistan selama protes terhadap serangan teror Pahalgam di Jammu, India, Rabu (23/4/2025). (Foto: AP)

Kepada media India, sejumlah saksi mata mengatakan bahwa pada Selasa (22/04/2025) sore waktu setempat, sekelompok orang bersenjata berseragam corak militer muncul dari hutan di dekat mereka dan menyerang kawasan padang rumput Baisaran, sebuah destinasi wisata populer di luar kota Pahalgam, distrik selatan Anantnag.

Sebagian besar turis yang tewas adalah WN India. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah India gencar mempromosikan wilayah Jammu dan Kashmir sebagai destinasi wisata, seiring dengan upaya konsolidasi politik di sana, dan memperketat keamanan demi menghadapi pemberontakan yang telah berlangsung selama beberapa puluh tahun.

Sementara itu India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir secara keseluruhan, tapi masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah. Hal ini membuat wilayah Kashmir menjadi titik rawan dalam geopolitik India-Pakistan secara lebih luas.

Insiden pada Selasa (22/04/2025) yang dianggap India didalangi teroris itu merupakan serangan paling mematikan yang menargetkan warga sipil India sejak teror Mumbai pada 2008. Kejadian ini mengancam meningkatnya ketegangan hingga tingkat lebih berbahaya antara India dan Pakistan.

Kelompok bernama The Resistance Front (TRF) mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menurut India, TRF adalah organisasi teror yang berafiliasi dengan kelompok militan Lashkar-e-Taiba, di Pakistan.

TRF mengklaim organisasinya sebagai kelompok separatis Kashmir. Organisasi itu dibentuk tahun 2019 setelah New Delhi menghapus status semiotonomi Jammu dan Kashmir, dan menurunkan status wilayah itu dari negara bagian hingga membaginya menjadi dua wilayah persatuan agar pemerintah punya kontrol besar

secara langsung.

Langkah itu memungkinkan warga non-Kashmir untuk membeli properti dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal itu membuat geram mayoritas warga Muslim Kashmir yang takut termarginalkan oleh agenda nasionalis Hindu di bawah Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party/BJP) pimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.

Kemudian, hal itu juga memicu ketegangan dengan Pakistan. New Delhi mengatakan bahwa perubahan ini telah memungkinkan wilayah tersebut untuk lebih terintegrasi ke dalam India secara keseluruhan, dan membawa manfaat ekonomi dan keamanan.

Diketahui pada hari Rabu (23/04/2025), PM Modi bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional, Ajit Doval dan Menteri Luar Negeri,

Serangan Brutal di Kashmir, Rasa Aman Lenyap

Pejabat India berupaya terus merespons kejadian penembakan massal di destinasi wisata Kashmir yang tewaskan 26 orang dan lukai 17 lainnya, dengan memperketat keamanan, menutup sekolah, dan memblokir jalan.

Subrahmanyam Jaishankar, bersama dengan para kepala keamanan daerah untuk merencanakan respons atas insiden ini.

"Dalang di balik tindakan keji ini akan diadili... Tekad kami untuk memerangi terorisme tidak tergoyahkan dan akan menjadi semakin kuat," kata PM India Narendra Modi lewat postingannya di X.

Ketua Menteri Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah mengatakan bahwa serangan ini "jauh lebih besar daripada apa pun yang pernah terjadi, yang ditujukan terhadap warga sipil dalam beberapa tahun terakhir. Saya sangat terkejut. Serangan terhadap para wisatawan ini adalah sebuah kekejian."

Pada Rabu (23/04/2025) juga, Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, mengunjungi lokasi serangan dan bertemu dengan para keluarga

korban.

Puluhan ribu pasukan keamanan dikerahkan berpatroli di wilayah tersebut dan pos pemeriksaan tambahan didirikan. Partai-partai politik regional juga mengadakan aksi protes mengutuk serangan itu.

Kepada Tim DW, Presiden fraksi perempuan Partai Demokratik Rakyat (People's Democratic Party/PDP) Jammu dan Kashmir, Anjum Fazili, mengatakan bahwa penduduk lokal merasakan "kesedihan dan rasa malu yang mendalam" atas serangan tersebut, sambil menyerukan pihak berwenang untuk "menghukum" pihak yang bertanggung jawab.

"Ini adalah insiden yang sangat tragis dan memilukan. Orang-orang yang datang ke sini untuk menikmati keindahan dan kedamaian di tempat ini telah kehilangan nyawa mereka," ujar dia. (Deutsche Welle, ist/nei)

PM India Akan Kejar Teroris Kashmir hingga 'Ujung Bumi'

PERDANA Menteri India, Narendra Modi, berjanji akan mengadili seluruh pihak yang terlibat dalam serangan mematikan di Kashmir yang menewaskan 26 orang.

"Saya katakan kepada seluruh dunia: India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukungnya," katanya dalam pidato pertamanya sejak serangan hari Selasa lalu di wilayah Himalaya tersebut.

"Kami akan mengejar mereka hingga ke ujung Bumi," tegasnya, dilansir kantor berita AFP, Kamis (24/4/2025).

Penembakan di daerah wisata Pahalgam tersebut merupakan serangan paling mematikan terhadap warga sipil di wilayah sengketa itu sejak tahun 2000.

Dari mereka yang tewas, 25 orang adalah warga India dan satu orang warga Nepal.

Atas peristiwa pembantaian ini, pemerintah India menuduh

pemerintah Pakistan mendukung "terorisme lintas batas" dan menurunkan hubungan dengan tetangganya itu melalui serangkaian tindakan diplomatik.

Pakistan telah membantah terlibat dalam serangan di Pahalgam tersebut.

Modi, yang berpidato di negara bagian Bihar untuk meluncurkan proyek pembangunan, pertama-tama memimpin hening cipta selama dua menit untuk mengenang mereka yang tewas.

"Saya katakan ini dengan tegas: siapa pun yang telah melakukan serangan ini, dan mereka yang merencananya, akan dihukum lebih berat dari yang mereka bayangkan", katanya, berbicara dalam bahasa Hindi di depan banyak orang.

"Mereka pasti akan membayar. Sekecil apa pun tanah yang dimiliki para teroris ini, sudah waktunya untuk menghancurkannya menjadi debu. Tekad 1,4 miliar orang India

akan mematahkan tulang punggung para teroris ini," cetusnya.

"Terorisme tidak akan luput dari hukuman," kata Modi. "Segala upaya akan dilakukan untuk memastikan keadilan ditegakkan," imbuhnya.

Kashmir telah terbagi antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan mereka pada tahun 1947, dengan keduanya mengklaim wilayah dataran tinggi tersebut secara penuh, tetapi memerintah bagian-bagiannya secara terpisah.

Kelompok-kelompok pemberontak telah meluncurkan pemberontakan di Kashmir yang dikuasai India sejak tahun 1989, menuntut kemerdekaan atau penggabungan dengan Pakistan.

Pasukan keamanan India telah meluncurkan perburuan besar-besaran di Kashmir untuk menangkap para pelaku serangan di Pahalgam, dengan sejumlah besar orang ditahan dalam operasi tersebut. (AFP, ist/nei)

Ide Bekal Praktis untuk Anak, Sehat dan Bergizi!

Menyiapkan bekal untuk anak setiap hari bisa menjadi tantangan tersendiri. Selain harus praktis, bekal juga perlu memenuhi kebutuhan gizi dan tentu saja disukai oleh si kecil. Anak-anak cenderung pilih-pilih makanan, jadi penting untuk membuat bekal yang menarik dan tidak membosankan.

Bekal yang sehat tidak harus rumit. Dengan sedikit kreativitas dan pemilihan bahan yang tepat, bisa menyiapkan makanan yang lezat, bergizi, dan tetap praktis. Bekal juga bisa menjadi momen menyenangkan bagi anak, apalagi jika tampilannya lucu dan menggemaskan.

Manfaat Membawakan Menu Bekal Sekolah untuk Anak

Sebelum mencari tahu resep menu bekal makan siang apa saja yang bisa dibawa anak ke sekolah, pahami dulu seberapa penting membawa sekotak makanan ini. Bukan sekadar mengobati lapar di tengah hari saja, ternyata ada banyak manfaat dari membawakan anak bekal sekolah setiap hari. Berikut manfaatnya.

Sumber Energi

Selain dapat membantu menghemat uang saku, sekotak bekal juga dapat membantu menggantikan energi anak yang hilang setelah beraktivitas sejak pagi hari.

Apalagi saat ini ia sedang dalam masa perkembangan anak usia 6—9 tahun, tentu tumbuh kembangnya harus didukung agar tetap optimal. Tumbuh kembang di masa ini meliputi perkembangan fisik anak, perkembangan kognitif anak, dan lainnya.

Mengurangi Risiko Serangan Penyakit

Dengan membekali sekotak makanan untuk anak, secara tidak langsung Anda telah membantu memenuhi kebutuhannya. Risiko anak mengalami obesitas, diabetes, serta tekanan darah tinggi juga akan menurun. Ini karena manfaat membawakan bekal sekolah untuk anak membuatnya mengurungkan niat untuk membeli jajanan yang tidak sehat.

Mendukung Fungsi Otak

Melansir dari laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC), penelitian menemukan bahwa asupan zat gizi yang terpenuhi secara optimal ternyata berpengaruh pada prestasi anak.

Secara rinci, makanan yang cukup dapat memperbaiki nilai akademik, meminimalisir ketidakhadiran, serta mendukung kerja dan perkembangan otak anak. Lantas, supaya tidak cepat bosan, apa saja pilihan menu olahan bekal makan siang sekolah untuk anak

yang mudah dibuat?

Ide Menu Bekal Sekolah Anak

Dr. Sandra Fikawati dan tim, dalam buku Gizi Anak dan Remaja, menjelaskan aturan penting terkait asupan gizi dan pola makan anak. Menurutnya, usahakan agar menu makan siang anak menyumbang sekitar sepertiga energi, vitamin, dan mineral. Sayangnya, terkadang Anda mungkin berpikir bahwa menyiapkan bekal sekolah anak itu susah-susah gampang.

Nasi Ayam Yakitori dengan Sayuran

Ide resep bekal makanan sekolah anak pertama yang bisa Anda buat hari ini yakni nasi ayam yakitori. Supaya asupan gizinya lebih beragam, selipkan beberapa potong sayuran yang terdiri dari daun bawang dan paprika merah serta hijau.

Pasta Salad

Jika si Kecil tampak bosan dengan menu dan porsi makan anak di bekal makan siangnya, tak ada salahnya untuk mengganti pasta sebagai makanan sumber karbohidratnya.

Baik itu makaroni, spaghetti, fetucini, ravioli, penne, dan lain sebagainya, bisa Anda sesuaikan dengan kesukaan anak.

Mengutip dari Healthy Children, pasta bisa menjadi ide variasi menu

bekal makan siang anak di sekolah.

Nasi Goreng Aneka Bakso

Ingin menyajikan nasi tapi dalam bentuk yang berbeda? Coba olah nasi putih biasa menjadi nasi goreng yang dicampurkan aneka bumbu dan topping.

Bukan hanya lebih kaya gizi, dijamin anak akan semakin lahap saat memakannya karena rasanya yang enak karena termasuk makanan sehat untuk anak.

Roll-ups Bento Isi Daging dan Sayuran

Sudah sering membekalkan nasi dan sudah pernah membawakan pasta untuk si Kecil? Kali ini, Anda bisa coba membuat sumber karbohidrat dalam olahan dan bentuk yang berbeda.

Ya, gunakan kentang yang tidak kalah mengenyangkan seperti nasi, dan olah menjadi mashed potato yang lunak dan lembut.

Nasi Kepal Isi Ayam

Nasi kepal atau onigiri versi Indonesia ini bisa menjadi pilihan bekal yang praktis dan mengenyangkan. Cukup siapkan nasi hangat, kemudian isi dengan tumisan ayam suwir berbumbu manis gurih. Setelah itu, bentuk bulat atau segitiga dan bungkus dengan nori agar mudah digenggam oleh anak. (nei,ist/dya)

Nasi Ayam Yakitori Sayuran

Pasta Salad

Roll-ups Bento Isi Daging dan Sayuran

Nasi Goreng Aneka Bakso

Nasi Kepal Isi Ayam

Inovasi Total: Chery Luncurkan Mobil Terbang Hingga Robot AI

Chery turut hadir di pameran Shanghai Auto Show 2025 yang resmi dibuka pada Rabu (23/4/2025). Pabrik asal China tersebut memamerkan jajaran mobil berteknologi Chery Super Hybrid, hingga mobil terbang dan robot.

Pameran Shanghai Auto Show 2025 akan berlangsung untuk masyarakat umum pada 25 April-2 Mei 2025. Acara bergengsi ini akan diselenggarakan di National Exhibition and Convention Center (NECC) yang terletak di kota Shanghai, China.

Pameran otomotif terbesar di dunia ini diikuti oleh 78 merek otomotif dengan lebih dari 1.400 unit kendaraan dipajang di etalase pameran.

Setiap merek membawa serta keunggulan teknologi dan desain mutakhir mereka untuk dipertontonkan kepada jutaan pengunjung yang



Mobil terbang Chery.
Foto: Luthfi Anshori/detikcom

datang dari berbagai penjuru dunia.

Khusus untuk Chery, merek ini menempati ruang pamer di booth hall 4.1. Chery menghadirkan kemajuan inovasi dan teknologi melalui jajaran mobil irit bahan bakar dengan teknologi Chery Super Hybrid (CSH), hingga robot manusia dan robot anjing.

"Dari mesin pertama yang dikembangkan sendiri di China hingga terobosan teknologi baru energi dan kecerdasan buatan saat ini, kami telah menghabiskan 28 tahun terakhir untuk mewujudkan komitmen kami menjadi perusahaan teknologi mobilitas hijau dan cerdas kelas dunia. Tema pameran kami kali ini adalah 'Merangkul Inovasi, Memenangkan Masa Depan'," ungkap Yin Tongyue selaku Chairman of Chery Holding Group, dikutip pada Kamis (24/4/2025)

"Kami memamerkan serangkaian model terbaru yang akan diluncurkan

untuk global, dari Chery, Exeed, Jaecoo, Jetour, dan iCAR. Kami juga menyiapkan zona teknologi inovasi khusus, menampilkan kemajuan terbaru kami di bidang mesin, elektrifikasi, dan sistem asisten pengemudi cerdas," sambung Yin.

Pada pameran Shanghai Auto Show kali ini, Chery mengangkat tema New Technology, New Integration, dan New Mission. Maka itu, jajaran produk yang ditampilkan pun kebanyakan kendaraan dan teknologi ramah lingkungan.

Dari jajaran mobil Super Hybrid CSH, misalnya, beberapa model yang ditampilkan antara lain Chery Tiggo 7 CSH, Tiggo 8 CSH, dan Tiggo 9 CSH. Chery juga turut memamerkan dua mobil konsep terbaru mereka, yaitu New QQ dan Tiggo 9L, termasuk mobil otonom Chery iBar. Chery juga meluncurkan mobil pikap kabin ganda terbaru mereka yang dinamakan Himla.



Chery Himla di Shanghai Auto Show 2025
Foto : istimewa

Menariknya, Chery tak hanya menampilkan kemampuan mereka di bidang kendaraan roda empat. Pabrik yang berbasis di Wuhu ini juga menampilkan ragam teknologi tinggi, dari mobil terbang, robot humanoid AiMOGA, hingga robot anjing bionik yang dinamakan Argos.

"Robot humanoid modern dan robot anjing Argos juga turut hadir, menampilkan aplikasi AI dalam empat skenario, mulai dari komputasi yang lebih cerdas hingga mengemudi otonom," kata Yin lagi.

Sebagai informasi, Shanghai Auto Show 2025 digelar setiap dua tahun sekali. Ajang pameran otomotif ini berlokasi di NECC yang merupakan pusat pameran terbesar di China dengan luas 360.000 meter persegi. (nei,ist/dya)



AiMOGA Robot
Foto : istimewa



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Mengenal Basilika Santa Maria Maggiore, Rumah Abadi Paus Fransiskus



Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Terkait lokasi peristirahatan terakhirnya, beliau pernah menyampaikan keinginan untuk dimakamkan secara sederhana di luar wilayah Vatikan, sebuah keputusan yang belum pernah terjadi dalam lebih dari seratus tahun terakhir.

Berbeda dari tradisi para Paus sebelumnya yang dimakamkan di gua-gua bawah tanah Basilika Santo Petrus di Vatican City, Paus Fransiskus justru memilih Basilika Santa Maria Maggiore yang terletak di seberang Sungai Tiber di Roma, sebagai lokasi pemakamannya.

Vatikan mengatakan pihaknya memperkirakan seremoni pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore akan berlangsung antara Jumat (25/4/2025) dan Minggu (27/4/2025) mendatang.

Basilika Santa Maria Maggiore

Dalam otobiografinya, Hope, yang terbit awal tahun ini, Paus Fransiskus juga pernah berpesan bahwa "ketika saya meninggal dunia, saya tidak akan dimakamkan di Santo Petrus, melainkan di Santa Maria Maggiore, dengan menjelaskan bahwa, "Vatikan adalah rumah bagi pelayanan terakhir saya, bukan keabadian saya," dilansir DW News, Selasa (22/4/2025).

Mengutip dari situs resminya (basilicasantamariamaggiore.va), Basilika Kepausan Santo Maria Maggiore telah menjadi ikon Kota Roma selama lebih dari 1.600 tahun. Terletak di puncak Bukit Esquiline, tempat ini jadi salah satu dari empat Basilika Kepausan terpenting di Roma dan dikenal sebagai tempat suci bagi Maria serta pusat kelahiran seni Kristen.

Basilika ini juga menyimpan ikon Maria paling sakral di Roma, Salus Populi Romani, yang diyakini berasal dari Santo Lukas.

Paus Fransiskus selalu datang berdoa di hadapan ikon ini sebelum dan setelah perjalanan apostoliknya.

Tempat ini juga menyimpan peninggalan palungan Bayi Yesus yang membuatnya dijuluki "Betlehem dari Barat".

Tradisi misa malam Natal pertama dimulai di sini dan terus dijaga hingga kini. Selain itu, jenazah Santo Matius dan Santo Jerome juga disembayamkan di dalamnya, bersama tujuh Paus.

Kekayaan sejarah dan seni yang dimilikinya, membuat Basilika Santa Maria Maggiore bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga ruang spiritual yang menyentuh emosi pengunjung lewat keindahan karya seni yang dipercaya terinspirasi oleh iman.

Dalam sejarah sebelumnya, sudah

ada tujuh Paus yang dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore.

Mulai dari Paus Honorius III (pontifikat: 1216-1227), Paus Nikolas IV (1288-1292), Paus Pius V (1566-1572), Paus Sixtus V (1585-1590), Paus Klemens VIII (1592-1605), Paus Paulus V (1605-1621), dan Paus Klemens IX (1667-1669).

Basilika Papale di Santa Maria Maggiore adalah salah satu dari empat Basilika Kepausan di Roma dan lokasi salah satu dari lima Pintu Suci yang terletak di seluruh kota untuk Yubelium 2025.

Makam Bernini

Jenius Barok yang luar biasa, Gian Lorenzo Bernini meninggal pada tanggal 28 November 1680, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-82.

Ia dimakamkan tanpa upacara atau kemegahan di sebuah makam sederhana di bawah tangga di sebelah kanan altar Kepausan di Basilika. Jika Anda berkedip, Anda akan melewatkannya.

Carilah sebuah prasasti yang terukir di anak tangga marmer. Makam itu tampak sederhana pada pandangan pertama, tetapi jika Anda mempertimbangkan bahwa ia dimakamkan hampir di bawah Altar Kepausan di salah satu dari empat Basilika Kepausan di Roma, kita ingat betapa ia dihormati.

Pintu Suci

Santa Maria Maggiore adalah salah satu dari empat basilika kepausan di Roma dan menjadi tempat bagi salah satu "Pintu Suci" kota itu. Gerbang yang dihormati ini menjadi pusat ziarah bagi umat Katolik selama Tahun Yubelium atau Tahun Suci.

Selama tahun-tahun khusus ini, umat Katolik berbondong-bondong ke kota itu untuk melewati pintu-pintu itu dalam rangka ziarah. Di antara Tahun Suci, pintu-pintu itu disegel dan ditutup dengan batu bata.

Langit-langit Renaisans yang Berkilau

Langit-langit Basilika yang menakjubkan dengan rangka kayu dan warna emas ini berasal dari abad ke-15. Paus Alexander VI memesannya dari Antonio Sangallo the Elder. Menurut legenda setempat, daun emas spektakuler yang menghiasi langit-langit tersebut konon merupakan emas pertama yang datang dari Dunia Baru.

Karya Seni Bernini

Bernini dimakamkan di Basilika ini, yang tidak mengherankan mengingat ia dianggap berjasa atas dua karya di dalam gereja tersebut: tangga spiral yang elegan di sakristi dan patung perunggu Philip IV dari Spanyol (nei,ist/dya)

Wajah Pendidikan (dari Hal 1)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan praktik ketidakjujuran akademik masih marak terjadi di perguruan tinggi, dengan angka menyontek mencapai 98 persen. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebutkan bahwa bentuk ketidakjujuran yang masih sering ditemukan di lingkungan kampus adalah perilaku menyontek.

Di tingkat sekolah, KPK mencatat bahwa perilaku menyontek masih ditemukan di sekitar 78 persen sekolah. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan atau SPI Pendidikan pada tahun 2024.

"Dengan kata lain, menyontek masih terjadi pada mayoritas sekolah maupun kampus," kata dia di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/4/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan, tercatat bahwa 43 persen siswa dan 58 persen mahasiswa masih melakukan tindakan menyontek. Dalam hal plagiarisme, hasil survei menunjukkan bahwa praktik ini terjadi di sekitar 43 persen perguruan tinggi dan 6 persen sekolah di Indonesia.

Lain hal dengan ketidakdisiplinan akademik, Wawan mengatakan bahwa 45 persen siswa dan 84 persen mahasiswa yang menjadi responden mengaku pernah datang terlambat ke sekolah atau kampus. Tak hanya siswa dan mahasiswa, ketidakdisiplinan juga terjadi di kalangan tenaga pengajar. Menurut 69 persen siswa, masih ada guru yang sering datang terlambat, sementara 96 persen mahasiswa menyatakan bahwa dosen mereka juga kerap tidak hadir tepat waktu.

"Bahkan di 96 persen dan 64 persen sekolah ditemukan masih ada dosen atau guru yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas," kata dia.

Adapun SPI Pendidikan tahun 2024 ini melibatkan responden dari lebih dari 36 ribu satuan pendidikan, yang mencakup lebih dari 35 ribu Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dasmen) serta sekitar 1.200 Satuan Pendidikan Tinggi (Dikti). Wawan menjelaskan bahwa total responden yang terlibat berasal dari berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan, dengan jumlah mencapai 449.865 orang.

Metode yang digunakan dalam survei ini terdiri dari dua jenis. Pertama, metode online yang dilakukan melalui WhatsApp, email blast, serta CAWI (Computer Assisted Web Interview). Kedua, metode hybrid yang menggunakan



pendekatan CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Dana Bos Tak Sesuai Peruntukkan

KPK mengatakan, masih ada 12 persen sekolah yang tidak menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya.

Wawan Wardiana mengatakan, angka tersebut ditemukan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024.

"Terkait dana BOS, masih terdapat

12 persen sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukan atau aturan-aturan terkait," katanya.

Dari temuan itu, ia menjelaskan, tujuh persen sekolah bahkan masih melakukan pungutan terkait BOS.

"Dan terdapat 40 persen sekolah masih ditemukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa atau proyek; 47 persen sekolah masih melakukan penggelembungan biaya penggunaan dana lainnya," ujarnya.

Ada juga temuan gratifikasi. Hasil

survei menunjukkan bahwa 30 persen dari guru/dosen dan 18 persen kepala sekolah/rektor masih menganggap pemberian hadiah dari siswa atau wali murid sebagai hal yang wajar untuk diterima.

"65 persen sekolah ditemukan bahwa orang tua siswa terbiasa memberikan bingkisan atau hadiah kepada guru saat hari raya atau kenaikan kelas," kata dia.

Pengadaan barang dan jasa juga disoroti. Hasil survei menunjukkan bahwa 43 persen sekolah dan 68 persen kampus menentukan vendor pelaksana/penyedia barang dan jasa berdasarkan relasi pribadi. "Ditemukan juga pengadaan/pembelian barang dan jasa dilakukan secara kurang transparan di 75 persen sekolah dan 87 persen kampus," ujarnya.

Sementara mengenai pungli, hasil survei menunjukkan 28 persen sekolah masih ditemukan pungutan di luar biaya resmi dari sekolah dalam penerimaan siswa baru.

"Pungutan lain juga ditemukan dalam pungli pengajuan sertifikat, dan pengajuan dokumen di sekolah dan kampus," ucap dia. (din, wid, rls, ist, ant/dya)

Mendikdasmen Siap Perbaiki Sistem Pembelajaran

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan siap memperbaiki sistem dan pendekatan pembelajaran guna mengatasi maraknya budaya menyontek di kalangan pelajar.

"Terkait dengan masih tingginya angka menyontek itu atau kebiasaan menyontek, kami akan berusaha memperbaiki sistem dan pendekatan pembelajaran, dan juga orientasi pendidikan," kata Mendikdasmen Mu'ti pada konferensi pers Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2024 & Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Jakarta pada Kamis (24/4/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan pihaknya siap mengubah orientasi pendidikan agar tidak hanya menekankan pada aspek pencapaian nilai dan skor saja, melainkan menekankan pada penguatan pendidikan nilai dan karakter.

Mu'ti menyebutkan pihaknya sudah mulai menerapkan perubahan orientasi pendidikan tersebut dalam pelatihan guru yang belakangan sudah menitikberatkan pada cara menguatkan pendidikan nilai dan juga bimbingan konseling bagi para murid.

"Ini yang sudah mulai kami terapkan di dalam pelatihan guru, sudah mulai kami masukkan aspek penguatan pendidikan nilai dan juga bimbingan konseling bagi para murid," imbuhnya.

Adapun salah satu perbaikan sistem dan pendekatan pembelajaran tersebut, lanjutnya, akan dimulai dengan penerapan pendekatan deep learning pada tahun ajaran 2025/2026.

Ia menerangkan pendekatan deep learning nantinya akan menekankan pada proses penemuan makna (meaning) dalam setiap materi yang dipelajari murid sehingga pada gilirannya dapat menjadi perilaku (behaving) atau melakukan apa yang dipelajari.

"Karena itu, Kemendikdasmen berusaha untuk memperbaiki bagaimana agar pembelajaran tidak sekedar menjadi proses transfer of knowledge yang menekankan pada aspek knowing," kata Mu'ti.

Terpisah, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku kaget saat mengetahui praktik menyontek di sekolah hingga perguruan tinggi masih tinggi.

"Sangat mengagetkan justru para penyontek itu 78 persen angkanya bahkan 90 persen di

kampus itu kaget juga saya ini," kata Nasaruddin di Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

"Jadi, ada sesuatu yang harus kita perbaiki," sambungnya.

Nasaruddin menilai, harus ada langkah-langkah dalam menanggulangi masalah menyontek yang menurutnya masuk kategori korupsi. Salah satunya adalah membangun persepsi korupsi itu adalah pamali.

"Mungkin dunia kependidikan dalam perspektif kami sebagai Kementerian Agama ini harus melakukan sakralisasi pelanggaran korupsi ini," ujar dia.

"Jadi maksud saya sakral ini bukan melihat korupsi itu sebagai sesuatu yang haram, yang sanksinya hanya lebih banyak di akhirat. Tapi bagaimana mengangkat meng-sakralkan pelanggaran korupsi ini menjadi pamali, jadi haram, itu hukumannya nanti di sana," sambungnya.

Menurut dia, kalau korupsi jadi pamali dan haram, orang-orang akan menganggap hukuman yang diterima akan segera didapatkan, tidak di akhirat, namun di dunia.

"Jadi sanksi diyakini diganjar dengan secepatnya," ujar dia. (din, rls, any/dya)



Pemprov Jatim 10 Kali Raih WTP Berturut-turut DPRD Beri Apresiasi Sekaligus Catatan Kritis

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Raihan ini menjadi yang kesepuluh secara berturut-turut sejak 2015.

DPRD Jatim memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis. Para wakil rakyat menegaskan sejumlah catatan penting dari BPK tidak boleh diabaikan, terutama terkait pengelolaan hibah dan dana desa yang belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban.

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyoroti dua hal penting yang dinilainya perlu segera mendapat respon serius Pemprov. "Ada dua yang harus segera kami respon, teman-teman pimpinan dan eksekutif. Pertama, ada Rp17,5 miliar yang belum ada SPJ-nya dari pihak eksekutif. Kedua, dana desa yang belum ada laporan LPJ-nya dalam audit BPK, karena ini hibah langsung," ungkap Musyafak Rouf dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur pada Kamis (24/4/2025).

Diketahui dalam rapat tersebut dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dokumen tersebut diserahkan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Musyafak Rouf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Politisi PKB tersebut juga menambahkan, DPRD akan mencermati lebih lanjut hasil laporan BPK secara keseluruhan. "Kinerja Pemprov Jatim dari sisi yang dilaporkan tadi, nanti akan saya lihat lebih lanjut," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menggarisbawahi pentingnya menjaga tradisi WTP yang telah diraih selama satu dekade berturut-turut. Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah abai terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

"Ya, kami harus mengapresiasi karena ini menunjukkan Pemprov Jatim menjaga tradisi 10 tahun berturut-turut WTP. Tapi karena juga melihat catatan rekomendasi dari



Suasana Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur pada Kamis (24/4/2025) saat dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dokumen tersebut diserahkan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Musyafak Rouf dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Dok.Ist)

BPK, ini yang kemudian jadi fokus kita. Tidak kemudian setelah selesai sidang ini, selesai juga prosesnya. Ada batas waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi, dan itu akan kita maksimalkan," ujar Deni.

Lebih jauh, Politisi PDI Perjuangan Jatim itu menyebut pengelolaan dana hibah dan bantuan keuangan desa menjadi perhatian utama. "Kalau kita ngomong urutan tadi, ya, yang pertama dan kedua yang disampaikan tadi menjadi fokus, terlebih lagi kita ingin melihat program dan detail dari bantuan keuangan desa," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti temuan BPK. "Dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, DPRD dan Pemprov akan berbagi peran sesuai kewenangannya. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan semua temuan diselesaikan secara tuntas," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan capaian opini WTP ini merupakan hasil dari kerja keras dan proses panjang, bukan sesuatu yang instan. Ia menyebut, proses evaluasi dan penguatan pelaporan sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak dirinya awal menjabat.

"Jawa Timur sudah 10 kali mendapat penilaian WTP dari BPK RI. Pencapaian tersebut tidak terjadi secara instan. Evaluasi dilakukan sejak lama, dimulai dari penguatan sistem pelaporan, audit internal, hingga pelaksanaan berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kalau dihitung, proses ini dimulai sejak 2015," tutur Khofifah.

Khofifah juga mengonfirmasi dirinya telah menandatangani sejumlah catatan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. "Tadi Pak Dirjen Pemeriksaan Keuangan V juga hadir dan saya sudah menandatangani rekomendasi tersebut," katanya.

Temuan BPK

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, mengungkapkan meski Pemprov Jatim kembali mendapat opini WTP, pihaknya tetap menemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP sepuluh kali berturut-turut sejak tahun 2015. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024, BPK masih menemukan kelemahan dalam pengendalian internal dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ungkap Widhi.

Adapun beberapa catatan penting yang disampaikan oleh BPK diantaranya penatausahaan keuangan kegiatan Unit Pelayanan Jasa (UPJ) di SMK Negeri yang belum berstatus BLUD masih belum memadai. Hal ini dinilai bisa menimbulkan ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan di tingkat satuan pendidikan.

Selanjutnya soal pengelolaan atas pelaksanaan belanja hibah yang belum memadai, baik dari sisi perencanaan, penyaluran, maupun pertanggungjawabannya.

Widhi menekankan temuan tersebut tidak memengaruhi secara material kewajaran laporan keuangan, namun tetap harus segera diperbaiki. "Temuan ini tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, namun tetap memerlukan tindak lanjut agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari," tegasnya.

Dalam forum tersebut, seluruh anggota DPRD dan perwakilan dari OPD Pemprov Jatim menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Jatim akan mengagendakan rapat kerja komisi-komisi bersama OPD terkait untuk membahas secara rinci catatan-catatan yang disampaikan dalam laporan BPK. DPRD juga akan mengawal proses pelaksanaan rekomendasi tersebut agar selesai tepat waktu dalam jangka waktu 60 hari yang telah ditetapkan. (Adv, Pra/Dya)

